



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. ARIFIN
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 92330

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.107.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/84 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
2. Tanah Seluas 1.500 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/300 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 865.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/85 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 212.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/95 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
6. Tanah Seluas 228 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **132.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, XENIA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 99.000.000



4. MOTOR, YAMAHA NMAX SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	16.890.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	120.200.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.376.090.000
III. HUTANG	Rp.	520.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.855.490.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.